

---

## Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis

**Rafi Alfian Hibrizie**

Universitas Islam 45 Bekasi

**Pranata Acun Sandriya**

Universitas Islam 45 Bekasi

**Rizky Fadillah Adrian**

Universitas Islam 45 Bekasi

**M. Backtiar**

Universitas Islam 45 Bekasi

**Yayat Suharyat**

Universitas Islam 45 Bekasi

Alamat: Jl. Cut Mutia No.83, Margahayu, Kec. Bekasi Timur., Kota Bekasi, Jawa Barat 17113  
Korespondensi penulis: [alpianrapi4@gmail.com](mailto:alpianrapi4@gmail.com)

**Abstract.** *One of them is economics in Islam and aims to make people's lives better. The human welfare expressed in the Qur'an alludes to human misery and happiness in this world and in the hereafter. Improvement can be achieved if part of financial independence is considered and good financial management can be recognized in real terms because it creates financial freedom. This exam uses subjective exploration with the help of written research. The consequence of this review, Government Assistance in an Islamic Perspective, is linked to the goals of Islam, particularly the implementation and support of the five basic standards of Maqasid Sharia, all of which lead to a better and just life in this world and the world.*

**Keywords:** *Economic Development, Welfare, Maqasid Syariah.*

**Abstrak.** Salah satunya ekonomi dalam Islam dan bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Kesejahteraan manusia yang diungkapkan dalam Al-Qur'an menyinggung kesengsaraan dan kebahagiaan manusia di dunia ini dan di akhirat. Peningkatan dapat dicapai jika bagian dari kemandirian finansial dipertimbangkan dan pengelolaan keuangan yang baik dapat diakui secara nyata karena menciptakan kebebasan finansial. Ujian ini menggunakan eksplorasi subyektif dengan bantuan penelitian tertulis. Konsekuensi dari tinjauan ini, Bantuan Pemerintah dalam Sudut Pandang Islam, dihubungkan dengan tujuan Islam, khususnya pelaksanaan dan dukungan dari lima standar dasar Maqasid Syariah, semua yang melenyapkan kehidupan yang lebih baik dan adil di dunia ini dan dunia.

**Kata kunci:** Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan, Maqasid Syariah.

## **LATAR BELAKANG**

Aspek keuangan Islam adalah salah satu kerangka moneter dunia. Kehadirannya sejalan dengan ekonomi dunia lainnya seperti ekonomi industrialis dan komunis. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki banyak perbedaan utama. Ekonomi Islam berorientasi pada maslaha dan falah dan berada di garis depan dalam memberikan berbagai konsep ekonomi yang tidak pandang bulu, merugikan dan eksploitatif. Saat ini, masalah keuangan Islam lebih berkembang tanpa henti daripada dua kerangka moneter saat ini. Sejak awal kemunculannya, ekonomi Islam banyak dicurigai, bahkan dianggap tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta dan metode ilmiah, terutama di kalangan sarjana dan ekonom Barat. Mereka tidak percaya dengan kemampuan ekonomi Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika para ilmuwan dan ekonom Barat mengabaikan kontribusi pemikiran ekonomi, terutama dalam buku teks tentang ekonomi dunia.

Namun, dari sudut pandang sejarah, ekonomi Islam dibahas dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, perkembangan ekonomi Islam terhenti akibat dikotomi antara agama dan sains yang muncul akibat dogmatisasi (Taqlid) pada Abad Pertengahan. Selain itu, dominasi ekonomi kapitalis dan sosialis yang kuat akibat kebijakan imperialisme dan kolonialisme berkontribusi pada pengabaian dan marginalisasi ekonomi Islam (Purwana, 2014).

Ekonomi Islam mulai berkembang menjadi kajian yang serius pada tahun 1930-an, ketika muncul pemikiran ekonomi Islam yang progresif dan dinamis yang mampu menjawab beberapa persoalan fundamental di bidang ekonomi. Salah satu tokoh terkemuka di bidang ekonomi adalah Abbas Mirakhor yang banyak menawarkan konsep ekonomi Islam, mulai dari prinsip dasar sistem ekonomi Islam hingga peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.

Masalah ekonomi tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kehidupan manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan akan pangan, sandang dan tempat perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidup, itu normal bagi seorang individu untuk melakukan dalam semua aktivitas terkait. Di alam semesta, orang-orang itu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan memenuhinya.

Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Islam mengajarkan bahwa manusia harus adil. Pemerataan dapat dicapai di semua bagian kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tugas menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sepanjang kehidupan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di antara mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya menghancurkan ketika manusia dalam ketahanan mengalami rasa kebersamaan, tidak ada kegiatan ekonomi yang dilarang oleh Islam, seperti riba, penyimpanan. kekayaan, upah yang tidak dibayar, manipulasi harga dan monopoli. Menurut perspektif Islam, kebijakan ekonomi menyiratkan kerangka sistem ekonomi yang dilengkapi untuk mendorong kehidupan ekonomi masyarakat yang adil.

Salah satu tujuan strategi ekonomi islam adalah untuk membantu kesejahteraan dan keputusan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga mengacu pada kriteria obyektif dari kebutuhan ekonomi seperti makanan, pendidikan, perumahan, barang dan jasa lainnya, dan aset tidak berwujud seperti fasilitas. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mendorong orang mengumpulkan sumber daya manusia dan material mereka untuk memuaskan keinginan masyarakat, serta untuk menghilangkan keinginan yang tidak diinginkan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Melihat kesejahteraan negara Indonesia menurut pandangan umat Islam, Indonesia bukan hanya negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, tetapi juga negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam memang memiliki nilai-nilai seperti yang disebutkan di atas dalam Surat Al-Baqarah dalam kaitannya dengan pentingnya kesejahteraan sosial, menunjuk ke arah barat atau timur dalam shalat tanpa mengabaikan pentingnya makna shalat, Al-Qur'an mengintegrasikan makna dan shalat itu. motivasi di balik doa dengan kehati-hatian dan kepedulian atas kesejahteraan masyarakat untuk perbaikan. Al-Qur'an menyampaikan pesan keimanan, tetapi juga mengingatkan pengikutnya bahwa pernyataan iman kepada Allah, Kitab-Nya dan Hari Akhir tidak dapat dianggap memadai kecuali jika digabungkan melalui kepedulian dan pelayanan kepada kerabat. dan anak yatim, orang miskin dan pelancong dan untuk menjamin kesejahteraan mereka, membutuhkan bantuan (Siregar, 2018).

Namun demikian, sesungguhnya Indonesia masih merupakan negara dengan masalah kesejahteraan yang serius. Di luar dugaan, kontribusi negara sebagai lembaga yang seharusnya berperan penting dalam membantu mensejahterakan terhadap warganya masih jauh dari harapan. Masalah ekonomi, sosial dan politik Indonesia yang berbeda-beda berkali-kali disebabkan oleh kegagalan negara dalam menjalankan mandatnya dengan baik. Mungkin

keberadaan Bumi tidak akan pernah dirasakan, apalagi oleh orang-orang yang tidak berdaya atau tidak berdaya, lemah atau rentan.

Dr. Aviliani selaku pendiri INDEF dan penasehat Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Migrasi, yang mengatakan bahwa peran pemerintah meliputi empat bidang, salah satunya adalah kesejahteraan. Pemerintah telah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai kegiatan program antara lain dana desa, dana desa yang dianggarkan setiap tahun dan meningkat dengan harapan dan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan kekayaan, namun kenyataannya demikian. bukan itu masalahnya. Meskipun masyarakat masih belum merasakan kesejahteraan yang digambarkan oleh pejabat pemerintah, pada tahun itu menelan dana federal hingga 70 triliun dolar, program tersebut gagal mengurangi kemiskinan dan penduduk Indonesia dan dengan demikian penulis . mencoba dengan kajian mini ini untuk memberikan gambaran tentang konsep kesejahteraan yang diajarkan oleh para ulama dalam Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan bantuan perpustakaan berupa buku, catatan atau sumber lainnya. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pembahasan memanfaatkan buku, artikel, catatan harian, web (internet) dan data lain yang berhubungan dengan topik untuk mencari masalah yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis signifikasi pemikiran Abbas Mirakhor tentang masalah ekonomi Islam. Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif, kata-kata yang disusun disajikan dengan cara naratif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesejahteraan adalah impian dan harapan semua orang di bumi ini. Mungkin setiap orang tua membutuhkan kesejahteraan anak-anaknya dan keluarganya, baik secara fisik maupun batin. Orang tua umumnya berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka bertemu untuk keluarganya, mereka benar-benar bekerja keras, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, mereka menawarkan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarga mereka dari berbagai gangguan dan bahaya yang mereka hadapi.

(Takhim, 2016) Ketika orang berusaha memenuhi kebutuhan, mereka tidak dapat memenuhi atau mendapatkannya tanpa bantuan orang lain. Dalam Muqaddimahnya, “Manusia adalah makhluk sosial”, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, seorang pedagang membutuhkan rekan bisnis untuk menjual barangnya dan juga membutuhkan pekerja untuk mengisi bahan baku atau mengubahnya menjadi barang konsumsi.

Dalam pemerintahan, kesejahteraan sering kali diperkirakan dengan nilai Produk Domestik Bruto per penduduk, yang merupakan proporsi antara nilai PDB dan proporsi populasi, tetapi jika kita melihat realitas masyarakat, kita dapat menyimpulkan bahwa bantuan kesejahteraan diukur per penduduk. Total Pertumbuhan produk bruto tidak mencukupi karena masih banyak masyarakat pedesaan yang hidup dengan di bawah standar hidup layak.

Tampaknya kemiskinan mengukur kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2015, BPS mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 10-11 persen dari total penduduk Indonesia dibandingkan September 2014 yang memiliki angka kemiskinan 27,7 juta orang. Nampaknya angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat pada tahun 2015. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah di berbagai daerah tampaknya masyarakat mulai menjauh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dan pencetus otonomi. khususnya pensiun yang didukung pemerintah.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam banyak kasus adalah pendapatan dan konsumsi. Ketika kesejahteraan dihitung dengan pendapatan, ada masalah dengan data sektor informal. Di Indonesia, jumlah pekerjaan di sektor informal lebih banyak daripada di sektor formal. Menemukan data tentang sektor resmi dan sektor informal secara umum memang sulit. Selain itu, masyarakat tidak akan menanggapi pertanyaan tentang berapa penghasilan yang mereka peroleh, apakah ketika ditanya jumlah yang mereka peroleh setahun sebelumnya, orang Indonesia lupa apakah mereka lebih suka tidak memperlakukan mereka dengan pajak yang lebih tinggi, atau apakah itu mereka malu karena penghasilan mereka lebih rendah? berasal dari operasi ilegal yang diketahui orang lain (Kholis, 2015).

Di sisi lain, Jika kita mengukur kesejahteraan terhadap masyarakat melalui pendekatan konsumeris, kita juga menemukan masalah yang bertentangan dengan kenyataan. Misalnya, masyarakat cenderung tidak mengungkapkan berapa banyak yang dihabiskan untuk barang mewah atau produk ilegal, hanya saja ada kecenderungan perbedaan karakteristik antar rumah tangga, Namun kita sebagai umat Islam tentunya memiliki pandangan yang berbeda tentang

kesejahteraan dengan mereka yang menganut ilmu ekonomi tradisional, Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas dan mempelajari pada gagasan kesejahteraan dalam Islam karena kita menyadari bahwa ada tiga tatanan status sosial. Berdasarkan pendekatan Zakat, golongan Ashnaf Tsamaniyah, golongan menengah dan golongan kaya (wajib zakat).

Pasal 11 Tahun 2009 UU Bantuan Sosial menegaskan bahwa bantuan sosial adalah prasyarat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, sehingga mereka dapat hidup dan tumbuh dengan baik, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban sosial mereka. Sementara itu, penyelenggaraan bantuan sosial pemerintah dilakukan oleh otoritas publik, pemerintah lingkungan dan daerah setempat yang terkoordinasi, terkoordinir, dan berdaya dukung sebagai administrasi yang ramah untuk memenuhi kebutuhan esensial setiap penduduk, termasuk pemulihan sosial dan federal. asisten pensiun, dukungan sosial. jaminan diri dan jaminan sosial (UU No 11, 2009).

Tujuan diadakannya kepedulian sosial adalah, pertama, untuk memperluas taraf, kualitas, dan kelangsungan hidup kesejahteraan. Kedua: Membangun kembali kemampuan sosial untuk memperoleh kemandirian. Ketiga: memperluas kemampuan beradaptasi sosial dalam mencegah dan mengelola masalah sosial. Keempat, meningkatkan kapasitas, kesadaran dan kewajiban sosial dunia usaha dalam melaksanakan bantuan sosial pemerintah yang terstandar dan terpelihara. Kelima, memperluas kapasitas dan kesadaran masyarakat setempat untuk pelaksanaan kepedulian sosial yang melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen pelaksanaan bantuan sosial.

Batasan petunjuk indikator ekonomi untuk mencerminkan tingkat kekayaan masyarakat meningkatkan perhatian global mengenai aspek kemajuan sosial. Sampai saat ini, kemajuan perbaikan dapat dibaca lebih jauh pada penanda moneter, misalnya, Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dianggap kurang untuk menggambarkan tingkat kemakmuran yang sebenarnya. Penanda keuangan ini umumnya diestimasi secara adil dengan menggunakan pendekatan terkait moneter (Suardi, 2021)

Kebahagiaan adalah sesuatu yang dialami dan dirasakan setiap orang dengan cara yang tidak terduga, jadi ini adalah masalah emosional untuk mengukur kebahagiaan. Untuk situasi ini, kebahagiaan menggambarkan tanda kesejahteraan emosional yang digunakan sebagai pelengkap indikator objektif. Beberapa studi pada indeks kebahagiaan menggabungkan kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan subjektif dengan bagian dari pemenuhan hidup dan perasaan positif. Beberapa studi kebahagiaan sebagai bahan navigasi publik, pemenuhan

hidup digunakan sebagai bagian dari kebahagiaan. Kemajuan petunjuk untuk mengukur kegembiraan publik Indonesia dilakukan oleh Focal Agency of Insights Finlandia. Indonesia Bliss List pertama kali didistribusikan pada tahun 2013 dan bergantung pada hasil kajian publik. Pada tahun 2014, BPS kembali menilai tingkat kepuasan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan Kajian Perkiraan Tingkat Kegembiraan (SPTK) 2014 dengan contoh sampel yang dapat digunakan untuk evaluasi nasional dan provinsi.

Indeks Kebahagiaan Nusa Tenggara Barat memberikan beberapa hasil yang menarik dilihat dari kualitas demografi dan ekonomi, yaitu: Pertama, indeks kebahagiaan penduduk metropolitan sedikit lebih tinggi daripada penduduk pedesaan. Kedua, indeks kebahagiaan paling penting bagi orang yang sudah menikah. Indeks kebahagiaan yang paling tinggi adalah pada usia 24 tahun, paling sedikit untuk yang lama (65+). Keempat, ada kecenderungan: semakin banyak anggota keluarga, semakin tinggi indeks kebahagiaan. Namun, dengan asumsi jumlah anggota keluarga bertambah menjadi setidaknya tujuh, indeks kebahagiaan cenderung berkurang.

### **Prinsip Utama Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam adalah bermacam-macam kelembagaan, khususnya kode etik formal dan informal serta ciri-ciri pelaksanaannya, yang didirikan oleh Shahibut Tasyri I. H. Allah SWT. Melalui pedoman yang berbeda digambarkan dalam Al-Qur'an, dikelola oleh Sunnah Nabi Muhammad dan menjangkau keadaan baru melalui ijtihad untuk mengarahkan penyebaran sumber daya terbatas, produksi, pertukaran barang dan jasa, dan sirkulasi pendapatan dan kekayaan (Fadilah, 2020).

Sistem ekonomi Islam mensyaratkan penyampaiannya harus didasarkan pada dua sudut, yaitu kebebasan dan keadilan. kebebasan disini adalah kesempatan yang ditumpuk dengan sisi tauhid dan keadilan, berlawanan dengan pemahaman kapitalis yang merupakan tindakan dari kebebasan rakyat untuk bertindak tanpa hambatan dari pihak manapun, namun sebagai keselarasan antara individu dan keadilan. komponen material dan spiritualnya, keseimbangan antara individu dan masyarakat dan komunitas dan lain-lain (Fadilah, 2020). Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kerangka keuangan Islam, Mirakhor merekomendasikan agar cara menangani kajian ekonomi Islam juga menggunakan pendekatan hermeneutik.

Pendekatan ini berbeda dengan interpretasi karena karakter hermeneutik adalah proses dimana makna ekonomi diturunkan dari interpretasi orde pertama. Dengan pendekatan ini, dinilai bahwa aspek ekonomi Islam nantinya akan kaya akan hipotesis moneter yang benar-benar berpijak pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk mencapai tujuan Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin (QS. Al-Baqarah [2]: 107), yang menghimbau setiap umat Islam untuk hidup dengan baik (QS. Al-Nahl [16]: 97) dan hidup dalam kemakmuran ( QS.al-Hajj [22]: 77),memberikan kenyamanan dan mengentaskan kemiskinan (QS. al-Baqarah [2]: 185), Penciptaan Kekayaan Bersama (QS. al-A'raf [7]: 96, 58), menjaga suasana cinta dan kasih sayang (QS. Maryam [19]: 97) dan menjamin kebebasan dari kerusakan akhlak (QS. al-Anfal [8]: 73; al-rummi [30]: 41), kelaparan dan ketakutan (QS. al-Nahl [16]: 112; al-Quraisy [106]: 4) dan ketegangan jiwa (QS. al-Ra'd [13]: 28) (Saifudin, 2019).

Secara metodologis, Islam memberikan aturan dan prinsip-prinsip umum dengan tujuan agar pergerakan ekonomi terjadi di sepanjang koridor umat manusia. Secara epistemologis, Islam tidak memisahkan ekonomi dari kerangka nilai. Pelajaran Islam adalah kebutuhan etis untuk mengontrol perilaku keuangan individu. Standar utama kerangka keuangan Islam adalah sebagai berikut: Pertama: hak milik. Aturan utama harta dalam Islam adalah bahwa Allah yang utama adalah pemilik sejati. Bagi seorang individu untuk secara substansial memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, ia diberikan hak milik. Dengan cara ini, standar kepemilikan kedua memberikan hak kolektif atas sumber daya yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang dapat memperoleh hak istimewa kepemilikan atas properti melalui manifestasinya atau berpotensi bergerak melalui pertukaran, kontrak, pinjaman, atau warisan (Muttaqin, 2018).

Kedua, kewajiban kepemilikan. Kewajiban pemilik individu adalah untuk berbagi pengembalian dan tidak menyalahgunakan, menghancurkan, menyalahgunakan atau memanfaatkan barang tersebut untuk tujuan yang diizinkan oleh hukum Syariah. Dengan asumsi bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban distribusinya dengan cara dan pada tingkat yang direkomendasikan oleh hukum Syariah dan tidak mengabaikan aturan Syariah, kebebasan hak milik individu tersebut tidak dapat ditentang dan tidak ada yang memiliki hak istimewa untuk menghilangkan klaim atas properti individu tersebut. atau kemudian mengambil alih hak orang lain (Muttaqin, 2018).

Ketiga, kontrak. Konsep kontrak dalam Islam tidak hanya penting menurut pandangan hukum pertukaran, karena merupakan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sah, namun juga mendasari konsep Syariah. Umat Islam terus-menerus dibantu

untuk mengingat pentingnya perjanjian kontrak dan bahwa umat harus menjaga kesepakatan mereka dengan Tuhan mereka. Salah satu alasan mengapa sistem muamalah Islam (sistem transaksional) begitu jelas adalah karena hal itu bergantung pada prinsip kontraktual yang kuat dan terlebih lagi pada keistimewaan dan komitmen kedua belah pihak terhadap kontrak.

Keempat: kepercayaan. Islam menggarisbawahi ketergantungan sebagai persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi setiap orang. Landasan keyakinan setara dengan landasan keyakinan. Memenuhi syarat-syarat akad dan terus menjaga janji yang diucapkan untuk anggota masyarakat lainnya adalah konsep mengingat kewajiban untuk tetap setia pada akad pertama yang asli antara manusia dan Allah SWT. (QS. Al-A'raf [7]: 172) menjaga janji dan iman adalah sifat-sifat orang beriman (QS. Al-Mu'minun [23]: 1-8), perintah untuk memenuhi jaminan bagi orang-orang beriman, dan Mengikuti ini ada tanggung jawab (QS. Saba [34]: 17) dan perintah sebagai sifat utama para nabi dan rasul (QS. Puing-puing Syura [42]: 107, 125, 143, 162, 178 dan 193) dan pengkhianatan dilaknat (QS Al-Anfal [8]: 58, Yusuf [12]: 52) (Rulloh, 2018).

Kelima: Kewajiban individu, kebebasan dan kepentingan pribadi. tugas, hak, dan batas-batas yang ditentukan dalam syariah harus diperhatikan jika seseorang atau suatu organisasi ingin memiliki karakter Islami. Orang-orang dijamin hak kodratnya, termasuk kebebasan individu untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka. Kebebasan-kebebasan potensial ini ada dalam peristiwa apa pun, ketika seseorang tidak dapat menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang mampu tetapi tidak memenuhi kewajibannya, maka hak itu juga hilang. Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi, syariah melegitimasi kepentingan seseorang selama tanggung jawab pribadi sesuai dengan kepentingan yang spiritual, duniawi dan abadi.

Keenam: bekerja. Pekerjaan itu sering disebut al-Amal dan al-fi'il. Al-Qur'an menjunjung tinggi pekerjaan, menempatkannya pada tingkat ibadah dan menganggapnya sebagai dimensi iman yang tidak terpisahkan. Sebaliknya, bermalasan-malasan atau membuang-buang waktu untuk melakukan pekerjaan yang tidak produktif dan sia-sia dipandang sebagai tanda kurang beriman dan tidak beriman. Karena Islam tidak menunjukkan perbedaan kelas, pekerjaan apa pun yang tidak bertentangan dengan peraturan Syariah bukanlah pekerjaan di bawah standar (Abdul Aziz, 2010)

Ketujuh: kekayaan. Islam melihat kekayaan sebagai jiwa masyarakat yang harus terus mengalir. Selanjutnya, pengumpulan kekayaan dilarang. akibatnya, aset dapat disumbangkan secara sah untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemanfaatan aset tersebut merupakan kewajiban yang diarahkan oleh peraturan syariah. Setelah memenuhi kewajiban, harta sisa menjadi milik pemiliknya namun harus dimanfaatkan sesuai hukum syariah. Terlebih lagi, Islam mengatur keberlimpahan untuk membatasi perebutan antara orang kaya dan orang miskin melalui penyebaran kekayaan secara adil (Aini, 2019).

Kedelapan, berkat. Pertimbangan penting dalam kerangka motivasi Islam adalah ide berkah, yang berlaku sebagai motivator material bagi orang untuk memperhatikan cara berperilaku yang sah. Gagasan keberkahan mengungkapkan bahwa cara berperilaku yang benar, khususnya cara berperilaku yang diridhoi oleh Allah SWT, akan dibalas secara berulang-ulang. Semakin baik cara berperilaku, semakin besar berkahnya. Konsep ini menekankan bahwa orang yang menghabiskan kekayaannya karena Allah tidak membuat kekayaannya berkurang, tetapi meningkat. Tindakan seperti itu memberi penulis banyak pujian. Gagasan ini membuat hubungan positif antara perilaku dan kekayaan sistem.

Kesembilan: berbagi risiko. Ini tergantung pada aturan pertanggungjawaban, sesuai dengan manfaat mana yang sah menurut pertanggungjawaban mereka sendiri dan mungkin masing-masing pihak juga bertanggung jawab atas kemalangan dan hasil yang ditimbulkan.

Kesepuluh: kompetisi dan kerjasama. Sistem ekonomi Islam tidak membuat orang menjadi instrumen sederhana untuk mencapai tujuan ekonomi atau pemerintahan. Islam mencoba mengarahkan umat manusia melalui solidaritas dan kerja sama untuk berkoordinasi dan bertanggung jawab atas aktivitas individu dan dukungan dalam usaha keuangan, mendorong dinamisme ekonomi dan pembangunan.

Oleh karena itu, Islam menggunakan kerjasama dan persaingan untuk menciptakan masyarakat yang ideal melalui harmonisasi dan rekonsiliasi antara dua kubu yang berseberangan. Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas mengungkapkan sifat kompetisi dan kerjasama, yaitu Orang bisa bekerja sama dan bersaing untuk kebaikan dan kejahatan. Al-Qur'an dan As-Sunnah menegaskan hal itu persaingan dan kerjasama

hendaknya digunakan dalam ketakwaan dan ketakwaan, bukan dalam kedengkian (Aini, 2019).

Paradigma sistem ekonomi Islam menantang pemikiran ekonomi konvensional dalam beberapa bidang, antara lain

- a. Keadilan dan kesetaraan adalah salah satu prioritas utama Islam dan ajarannya di bidang ekonomi. Konsep fairness dan keadilan dari produksi hingga distribusi diabadikan dalam sistem. Keadilan sosial dalam Islam mencakup upaya untuk menciptakan dan menjamin kesempatan yang sama dan menghilangkan berbagai hambatan pemerataan bagi semua anggota masyarakat.
- b. Kerangka spiritual dan moral dari paradigma Islam menekankan pentingnya hubungan manusia di atas dominasi material.
- c. Hubungan antara individu dan masyarakat seimbang di bawah sistem Islam. Diatur untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pribadi dan kekayaan tidak dilarang.
- d. Pencarian individu untuk keuntungan maksimal dalam bisnis dan konsumsi maksimal untuk kepuasan bukan satu-satunya tujuan masyarakat dan konsumsi mewah tidak dianjurkan.
- e. Mengakui dan melindungi hak milik semua anggota masyarakat merupakan landasan masyarakat yang berorientasi pada pemegang saham yang melindungi hak semua orang dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka (Hadyantari, 2018)

### **Konsep Kesejahteraan dalam Islam**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kemakmuran" berasal dari kata "kaya", yang juga bisa berarti "keadaan baik" dan "selamat", serta "selamat", "abadi", dan "sukses". Dari sudut pandang yang lebih luas, kesejahteraan adalah pembebasan manusia dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang benar-benar aman dan memuaskan setiap hari. Sebagaimana tertuang dalam UU SJSN No. 11 Tahun 2009, bantuan sosial pemerintah diperlukan

bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan materiil, mendalam, dan sosialnya agar dapat hidup dan tumbuh secara wajar serta mengatasi persoalannya sendiri.

Karena setiap orang merasakan dan mengalami kebahagiaan secara berbeda, sulit untuk mengukur kebahagiaan adalah masalah subjektif. Dalam hal ini, kebahagiaan menggambarkan tanda subjyektif kesejahteraan yang digunakan sebagai pelengkap petunjuk indikator obyektif. Kesejahteraan diukur dengan delapan indikator, menurut Statistik Finlandia: pendapatan, berapa banyak yang digunakan atau pengeluaran keluarga, di mana mereka tinggal, di mana mereka memilih untuk hidup, kesehatan mereka, seberapa mudah menggunakan layanan kesehatan, dan seberapa mudahnya. adalah melaporkan anak-anak. sekolah dan kemudahan mendapatkan transportasi.

Keterbatasan indikator ekonomi untuk mencerminkan tingkat kekayaan masyarakat meningkatkan kesadaran dunia tentang aspek kemajuan sosial. Indikator-indikator ekonomi seperti ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang kemajuan pembangunan sampai saat ini: Perluasan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dianggap sebagai indikator yang tidak memadai untuk kemakmuran yang sebenarnya. Biasanya, indikator moneter digunakan untuk mengukur indikator keuangan tersebut secara objektif (Hadyantari, 2018).

Falah adalah istilah umum yang digunakan dalam ajaran Islam untuk menggambarkan kehidupan yang aman secara finansial dan spiritual. Gagasan falah menyinggung tujuan Islam, yang juga merupakan tujuan dari masalah ekonomi Islam, khususnya pelaksanaan dan dukungan dari lima standar penting yang terkandung dalam Maqasid Syariah, khususnya destruktif, untuk memberdayakan kehidupan yang unggul dan layak. untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan terhormat. baik di dunia ini maupun di masa depan Pemikiran bantuan pemerintah konvensional pada umumnya akan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan material, kesejahteraan yang mendalam tampaknya kurang mendapat pertimbangan dibandingkan Kesejahteraan.

Karena dapat mengarah pada penciptaan posisi baru, pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi untuk mencapai pemerataan distributif. Secara alami, ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan riil, tanda kemakmuran ekonomi Islam. Karena tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Menurut Imam Al-Ghazal, komitmen sosial masyarakat kepada Allah

SWT kini mencakup tindakan finansial. Kehidupan di dunia ini dan orang-orang akan hilang jika hal ini tidak tercapai. Selain itu, Al-Ghazali juga mengemukakan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan keuangan, yaitu:

Pertama, memenuhi kebutuhan setiap kehidupan. Kedua, menghasilkan kekayaan bagi dirinya dan keluarganya, dan ketiga, memberikan bantuan kepada yang kurang mampu. Dalam ayat 3 dan 4 Sura Quraaisy, Al-Qur'an menyebutkan indikator kesejahteraan: Karena itu hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Kita dapat melihat bahwa ada tiga indikator dalam ayat di atas. Al-Qur'an berbicara tentang kesejahteraan dalam hal beribadah kepada Allah, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Ketergantungan total manusia kepada Tuhan yang memiliki Ka'bah adalah tanda pertama kesejahteraan. Indikator perkembangan spiritual ini menunjukkan bahwa terpenuhinya semua indikator kesejahteraan material tidak menjamin kebahagiaan bagi pemiliknya. Hilangnya rasa lapar (pemuasan kebutuhan konsumsi) dalam ekonomi Islam adalah poin kedua. Kepuasan kebutuhan konsumsi masyarakat sebagai tanda bantuan pemerintah harus memadai (hanya untuk menghilangkan nafsu makan) dan tidak berlebihan, apalagi menyimpan. untuk menambah kekayaan (Nasution, 2021).

Hilangnya rasa takut yang memberikan rasa aman, tenteram, dan damai adalah poin ketiga. Ketika banyak kejahatan, termasuk perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian terjadi di masyarakat, ini menunjukkan bahwa individu tidak mencapai kemakmuran atau menemukan kenyamanan dalam hidup.

Rasulullah SAW bersabda: Kekayaan tidak datang dari harta yang terbaik, namun orang kaya memiliki jiwa yang kaya” (HR. Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi). tingkat gaji secara logis Pergantian moral peristiwa dan kesejahteraan emosional menghasilkan SDM berkualitas, dan SDM berkualitas mengarah pada perluasan dalam ciptaan yang lengkap, sehingga pendapatan individu juga meningkat.

### **Indikator Kesejahteraan dalam Islam**

Ada harapan bahwa ketika ekonomi tumbuh, kemakmuran akan datang. Akan tetapi, kemakmuran yang sesungguhnya terjadi melalui proses sinergis antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekuitas riil dapat terjadi. Namun, tergantung pada sudut pandang seseorang, konsep dan definisi kesejahteraan

bisa sangat bervariasi. Dalam keadaan unik ini, cara berpikir sosial yang diperkenalkan Yang dirujuk ke 10 adalah: Konsep 1 sampai 4 perlu disebutkan. Jika kita menyinggung bagian-bagian tersebut, pengertian berkembang adalah Ada empat petunjuk mendasar. Keempat indikator tersebut adalah keamanan dan ketertiban sosial, pemenuhan kebutuhan pokok dan sistem distribusi, sistem nilai Islam, dan kekuatan ekonomi di sektor riil (perdagangan dan industri).

Pada penanda utamanya, premis keberhasilan terletak pada sisi positif pelajaran Islam yang muncul dalam kehidupan moneter negara. Jika kita benar-benar mengabaikan aturan Allah SWT, kemakmuran sejati tidak akan pernah tercapai. Menentang ketentuan Allah SWT tentu menjadi sumber hilangnya bantuan dan nikmat pemerintah dalam kehidupan manusia, sesuai QS Thaha: 124

Pada petunjuk selanjutnya, kemakmuran tidak dapat dicapai jika tidak ada tindakan ekonomi. Sektor riil yaitu perluasan perdagangan dan industri merupakan jantung kegiatan ekonomi. Industri riil ini berada di inti ekonomi Islam dan memiliki dampak terbesar pada tenaga kerja. Sebenarnya, wilayah ekonomi Islam dimaksudkan untuk memperkuat pameran wilayah asli karena semua perjanjian dan pertukaran ekonomi Islam bergantung pada wilayah asli. Sistem pasokan dan distribusi yang mendasar adalah indikator ketiga. Jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sejahtera. Sistem distribusi ekonomi sangat berperan dalam menentukan kualitas kesejahteraan jika hanya sebagian masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok tersebut dan sebagian lainnya tidak. Menurut ajaran Islam, sistem distribusi yang baik adalah yang dapat menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan serta roda perekonomian dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Qs. Al-Hasyr: 7).

Pada petunjuk selanjutnya, kesuksesan tidak dapat dicapai jika tidak ada tindakan moneter. Sektor riil yaitu perluasan perdagangan dan industri merupakan jantung kegiatan ekonomi. Industri riil ini berada di jantung ekonomi Islam dan memiliki dampak terbesar pada tenaga kerja. Sebenarnya, wilayah keuangan Islam dimaksudkan untuk memperkuat pameran wilayah asli karena semua perjanjian dan pertukaran keuangan Islam bergantung pada wilayah asli.

Sementara indikator keempat memperkirakan kesejahteraan dari sudut pandang keamanan dan ketertiban sosial. Ketika gesekan dan konflik destruktif antara kelas dan

kelompok sosial dapat dihindari atau diminimalkan, masyarakat dikatakan sejahtera. Ketakutan dan ketidakamanan tidak mengarah pada kesejahteraan.

Pembangunan dapat mengarah pada kesejahteraan sebagai tujuan utama jika aspek kemandirian ekonomi dan manajemen ekonomi yang efektif dilaksanakan secara realistis. Oleh karena itu, syarat yang paling menentukan untuk mencapai kemakmuran masyarakat dan bangsa adalah berkembangnya kemandirian ekonomi dan pengelolaan ekonomi yang sehat. Dalam pancaran ajaran Islam, sangat penting untuk membentengi kekuatan ekonomi. Setiap bangsa harus memiliki kedaulatan ekonomi karena itu sangat penting. Suka atau tidak suka bangsa itu akan rela mendikte kepentingan asing karena titik kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan nasional.

Cara melindungi kekuatan ekonomi sebenarnya adalah strategi keuangan yang bergantung pada gagasan masalah. Masalah adalah gagasan dalam pandangan dua perspektif pokok, yaitu manfaat dan keberkahan. Keuntungan dicapai ketika manfaat dan berkah muncul dari proses tersebut. Namun, tidak semua yang bermanfaat itu berkah, tapi semua yang menjadi berkah itu cukup bermanfaat. Alkohol, misalnya, dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dalam bentuk pajak, tetapi yang pasti alkohol membawa lebih banyak ketidakbahagiaan dan kerugian daripada kebaikan. (Lihat Al-Baqarah: 219, Qs. Al-Maidah 90-91). Dua syarat harus dipenuhi dua arah agar kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.:

1. Praktiknya harus konsisten dengan tujuan Maqashid Syariah atau hukum Islam. Yaitu perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.
2. Kebijakan tersebut didasarkan pada perlindungan kepentingan masyarakat miskin

Selain itu, manajemen keuangan adalah aspek lain yang dapat menambah pengakuan kekayaan. Karena berkaitan dengan pengelolaan perekonomian, maka pengelolaan merupakan variabel yang sangat penting. Tentu saja, transparansi dan profesionalisme adalah tiga aspek paling mendasar dari tata kelola ini. Keterusterangan sangat penting dan erat kaitannya dengan transparansi dan kenyamanan dalam memberikan data kepada masyarakat luas. Pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan transparansi. Dibutuhkan ruang bagi masyarakat dan seluruh pemangku

kepentingan untuk mengakses berbagai informasi terkait dan menawarkan saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Profesionalisme adalah indikasi lain. Profesionalisme ini adalah aturan mendasar yang memastikan berjalannya motor moneter dan menentukan sifat ciptaan yang dihasilkannya. Menurut ajaran Islam, ummat harus selalu bertindak secara profesional (itqan) untuk memaksimalkan potensi dan sumber dayanya. Profesionalisme juga memperluas kelangsungan dan efektivitas pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuannya.

Namun demikian, akuntabilitas atau pertanggungjawaban (amana dan mas'uliyah) merupakan indikator terakhir dari manajemen. Pentingnya tanggung jawab ditekankan dalam ajaran Islam. Setiap orang tidak diragukan lagi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks manajemen keuangan, tanggung jawab terkait erat dengan aspek manajerial dan etika (Bahsoan, 2011).

Akuntabilitas administratif adalah alat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memenuhi tujuan pembangunan ekonomi dan tidak dikompromikan oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanggung jawab etis adalah instrumen yang memastikan kesesuaian dan keadilan kegiatan ekonomi. Tidak semua yang dapat diperhitungkan secara administratif juga dicatat secara etis.

Misalnya, sesuai peraturan dan pedoman hukum yang berlaku, jaminan keuntungan untuk akad Murabahah antara bank syariah dan klien harus dilaporkan dengan tepat sesuai peraturan dan pedoman yang relevan. adalah semacam kewajiban manajerial. Bagaimanapun, pertanyaannya adalah: Sekalipun margin keuntungan adalah hasil dari akad, dapatkah secara etis dibenarkan jika 200 persen? Ini jelas tidak etis. Kita dapat melindungi diri kita sendiri dari eksploitasi keuangan yang berlebihan dan tidak adil dengan mengikuti pedoman tanggung jawab etis. Contoh lain, apakah benar lembaga zakat membelanjakan seluruh dana INFAQ-nya untuk iklan. Fiqh bebas menggunakan dana INFAQ untuk tujuan apa pun selama itu bermanfaat, tetapi secara etis dibenarkan untuk menggunakan semuanya. Dana INFAQ untuk Iklan Iklan terkait zakat tidak etis dan tidak pantas. Jika cadangan INFAQ akan digunakan untuk promosi, sebaiknya batasi tarif yang dapat digunakan, misalnya batas 20%, yang sesuai dengan komponen tanggung jawab etis.

### **Konsep Keadilan Ekonomi**

Allah SWT. menciptakan dan membentuk ciptaannya, termasuk alam semesta dan alamnya serta manusia. Ketika keseimbangan ini dilanggar, semua sistem kehidupan dapat runtuh atau berhenti berfungsi dengan baik, termasuk kegiatan ekonomi manusia. Islam mengatakan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang harus dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Tujuan utama umat Islam adalah terciptanya keadilan ekonomi, yang merupakan bagian dari masyarakat yang adil, sehat dan bermoral. Islam berharap untuk menciptakan ekonomi yang energik, teratur, makmur dan adil di mana setiap anggota masyarakat menerima upah yang adil. Komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah:

Pertama, setiap orang dalam masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya alam yang berlimpah, tidak terbatas, dan gratis (Bahsoan, 2011). Kebebasan berarti tidak menghalangi orang lain untuk menggabungkan karya kreatif mereka dengan sumber daya yang dimaksudkan untuk digunakan oleh individu anggota masyarakat menurut aturan Syariah. Peluang adalah situasi yang bermakna di mana individu dapat mencoba apa saja. Keberhasilan atau kegagalan bisnis seseorang tergantung pada usaha dan keterampilan mereka. Kesetaraan harus dipertahankan bersama. Sumber daya yang sama dan kesempatan yang sama dalam Islam didasarkan pada pandangan bahwa sumber daya alam tidak diciptakan oleh manusia tetapi pemberian dari Allah SWT. menguntungkan semua anggota masyarakat, dan oleh karena itu kebebasan dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya ini harus dibagi secara merata dengan semua orang. Karena Islam mengakui bahwa individu adalah agen rasional, Islam memandang akar penyebab kemiskinan secara berbeda. Kelangkaan tidak dianggap penting sebagai penjelasan kemiskinan dalam Islam. Penyebab utama kemiskinan adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi, buruknya distribusi kekayaan dan pendapat, serta pemborosan yang menyertainya

Kedua: keadilan dalam bertransaksi. Islam mensyaratkan bahwa aturan bisnis di pasar termasuk pengaturan faktor-faktor yang sesuai dengan Syariah dan sumber permintaan dan penawaran untuk produk sebelum mereka memasuki pasar, kode etik berbasis Syariah untuk pembeli dan penjual, dan harga penawaran yang berbeda dari beberapa faktor yang diatur oleh Syariah - Dilarang oleh hukum. Aturan penawaran dan permintaan tidak hanya mengatur izin untuk meminta dan menawarkan produk, tetapi juga menelaah fenomena ini secara detail. Tidak semua permintaan produk akan dianggap valid dan tidak semua pengiriman produk ke pasar akan memenuhi syarat.

Aturan perilaku setiap orang di pasar dimaksudkan untuk memastikan perdagangan yang adil. Tindakan seperti penipuan, manipulasi, praktik monopolistik, koalisi dan merger dalam bentuk apa pun antara penjual dan pembeli, meremehkan produk, membuang, menimbun, dan menawarkan tanpa maksud untuk membeli dilarang. Setiap perilaku yang mengarah pada hak milik tanpa proses kerja yang tepat dilarang

Ketiga, hak untuk berbagi adalah suatu mekanisme dimana kebebasan dan kesetaraan dapat direkonsiliasi tanpa saling melanggar. Islam memandang kemiskinan dan ketimpangan bukan sebagai akibat dari kelangkaan atau kekurangan sumber daya atau cara produksi dan distribusi yang asinkron, tetapi sebagai akibat dari pemborosan, pemborosan, pemborosan dan pengabaian pembayaran bagi masyarakat. Islam tidak segan-segan berasumsi bahwa semua orang berbagi standar hidup tertentu; Oleh karena itu, mewujudkan hak-hak orang miskin berarti kesetaraan dan keadilan, bukan hanya kemurahan hati

### **Peran Negara dalam Ekonomi Islam**

Islam memandang hubungan ekonomi dan perilaku sebagai sarana untuk mengintegrasikan masyarakat ke tingkat realitas yang lebih tinggi. Untuk tujuan ini, seseorang harus memandang kinerja keuangannya sebagai alat, bukan tujuan. Semua kode etik keuangan ditujukan untuk individu dan kelompok. Kelompok ini diatur dalam bentuk pemerintahan yang diwakili oleh negara. Negara dipandang sebagai institusi fundamental yang harus ada untuk mengatur kehidupan sosial, menciptakan kesejahteraan material dan spiritual, serta mendukung dan menyebarkan agama, Dengan kegiatan dasar yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun yang membuat setiap orang mengikuti syariah dalam kehidupannya,

Negara dalam bentuk penyelenggaraan sistem hukum yang ideal harus hadir sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawabnya dengan ridha Allah, tanpa membedakan antara dirinya dan rakyatnya. Karena negara adalah pihak yang diberdayakan untuk membuat peraturan dasar yang mendukung dan melindungi pertumbuhan dan operasi ekonomi. Tujuan sebenarnya dari setiap negara yang akan didirikan adalah untuk menawarkan manfaat bagi semua warga negaranya tanpa kecuali. Maslaha harus bisa membimbing seluruh anggota masyarakat untuk kebaikan dunia dan akhirat (Mahtum, 2019). Peran terpenting negara sangat erat kaitannya dengan ekonomi politik Islam (ZAKIYATI, 2022). Selain itu, peran negara bermula dari konsep khilafah dan

selanjutnya kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk melaksanakan *Falah*. Negara adalah pemegang amanat Allah dan Rasul-Nya serta kewenangan masyarakat untuk melakukan tugas-tugas kolektif guna mencapai kesejahteraan dan (*al-adl wah ihsan*) bagi seluruh rakyat. Secara umum, peran negara ini terkait dengan implementasi konsep pasar syariah dan implementasi tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Menurut Abbas Mirakhor, peran negara dalam ekonomi Islam adalah; Pertama, harus dipastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan sumber daya alam dan mencari nafkah. Kedua, harus dipastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, keterampilan dan teknologi serta kesempatan untuk menggunakan semua sumber daya tersebut. Ketiga, memastikan bahwa pasar dikendalikan dengan baik sehingga keadilan dalam pertukaran dapat tercapai. Seperti Nabi Muhammad, beliau sering melakukan audit pasar untuk mengontrol harga dan mekanisme pasar serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Keempat, memastikan bahwa transfer kekayaan dari si kaya ke si miskin sesuai dengan aturan syariah. Kelima, menjamin pembagian yang adil bagi generasi mendatang melalui penerapan aturan pewarisan. Untuk memaksimalkan peran itu, negara diberi hak untuk merancang kebijakan ekonomi tertentu untuk mencapai semua tujuan tersebut. Untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya, hukum syariah memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai, menggunakan dan mengelola berbagai sumber daya alam, seperti pertambangan. Syariah juga memungkinkan pemerintah untuk memungut pajak ketika ada kesenjangan antara pendapatan sumber daya dan pengeluaran pemerintah. Negara juga bisa memiliki utang, selama tidak berbunga dan dalam keadaan darurat.

Oleh karena itu, negara memiliki wewenang dan tugas tertinggi untuk menghilangkan ketimpangan dan kesenjangan dalam masyarakat akibat berbagai praktik ekonomi yang tidak sehat seperti penimbunan, monopoli, oligopoli, dan penipuan. Seperti yang diramalkan Ibnu Khaldun, peran negara adalah untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan manusia (ZAKIYATI, 2022). Oleh karena itu, kelemahan intervensi negara dalam ekonomi kapitalis liberal membawa beberapa kemungkinan dan konsekuensi negatif. Mulai dari tingkat pendapatan yang tidak merata, kemiskinan yang bertambah, dan kesenjangan sosial yang meningkat. Hal ini terjadi, pasar yang berfungsi optimal membuat persaingan tidak terhindarkan,

pengusaha dengan modal besar memukul dan memeras pengusaha kecil. Modal dan kekayaan hanya berputar di sekitar segelintir orang.

Sebaliknya, dalam sistem sosialis, ketimpangan, kemiskinan, dan distribusi pendapatan dapat diatasi. Namun, sistem persaingan dilarang, motivasi untuk berhasil dan meningkatkan produktivitas biasanya tidak ada. Akibatnya, sistem ini tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, maka peran negara harus membantu menciptakan kondisi yang mendukung mekanisme kegiatan ekonomi untuk bertindak adil dan mendorong munculnya moralitas yang dihiasi dengan sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Untuk menciptakan persaingan yang sehat sebagai lawan dari konsep liberal-kapitalis atau sosialis-komunis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pertanyaan yang diangkat dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Abbas Mirakhor adalah salah satu tokoh penting dalam ekonomi Islam, termasuk pembaharu aspek ekonomi Islam dan salah satu tokoh mazhab Iqtishad. Dalam ekonomi Islam, hal itu tampak dalam penggunaan metodologi hermeneutika sebagai jawaban lengkap bagi penyelidikan tanpa henti atas kerangka moneter Islam. Sehubungan dengan tugas negara, Mirakhor mensyaratkan negara untuk hadir sebagai penjaga permintaan sah yang optimal. Karena tugas negara terkait erat dengan ekonomi politik Islam. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa semua individu memiliki akses masuk yang setara ke aset dan pekerjaan normal, negara harus memastikan keseragaman setiap orang dalam segala hal, negara harus memastikan pasar yang dibebaskan dari kontrol dan kontrol, dan menjamin pertukaran kelimpahan bagi orang miskin dan orang miskin. Proses distribusi keadilan yang bertahan untuk generasi mendatang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Abdul Aziz, A. Z. (2010). *MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH* (A. H. M. Abu Hasan Mubarak, Ed.; No. 1; Vol. 1, Issue 1). CV. Alfabeta. <http://web.syekhnurjati.ac.id>
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>

- Bahsoan, A. (2011). MASHLAHAH SEBAGAI MAQASHID AL SYARIAH (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Inovasi*, 8(01), Article 01. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>
- Fadilah, N. (2020). *Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1(1).
- Hadyantari, F. A. (2018). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. 6(1).
- Kholis, N. (2015). KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), Article 2. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/445>
- Muttaqin, R. (2018). *Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective*. 2.
- Nasution, S. (2021). Konsep Pariwisata Halal Berbasis Ekonomi Kreatif Dengan Sharia Regulation dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.8431>
- Purwana, A. E. (2014). KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Justicia Islamica*, 11(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.91>
- Rulloh, N. (2018). *PENGARUH KUNJUNGAN WISATA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR OBJEK WISATA BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Lumbok Resort Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat)* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/3181/>
- Saifudin, M. C. (2019). PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *At Tujjar*, 7(2), Article 2. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/atTujjar/article/view/3901>
- Siregar, P. P. (2018). *PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 1(1).
- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Takhim, M. (2016). SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v10i2.142>
- ZAKIYATI, T. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERBASIS NILAI KEADILAN* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/26256/>